

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN DI PESANTREN

*Development Communication Program through Empowerment as a Learning
Material in the Participants*

Adhi Iman Sulaiman

FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Kampus Grendeng Purwokerto

E-mail: adhi.2005unsoed@gmail.com

ABSTRACT

Islamic boarding schools can act as religious education institutions and also become institutions of social and economic education in improving the welfare of pesantren, santri, alumni and their fellow communities. The research aims to design a model of development communication through the santri economic empowerment program in Islamic boarding school education. Using Participatory Learning and Action (PLA), the selection of informants purposively, consisting of boarding schools, religious teachers, santri and community leaders. Data collection through documentation analysis, direct observation, interviews, Focus Group Discussion (FGD) and Participatory Decision Making (PDM). Research location in Al-Muttaqin Islamic Boarding School, Beber Cirebon, West Java. Analysis of research data using interactive analysis through the stages of data reduction, data presentation and verification and conclusion. The results of the study show that pesantren can design a communication model for counseling and empowerment of santri economics through entrepreneurship and cooperative material in the education curriculum as a choice or additional lesson for santri along with practical and internship programs. Santri will have entrepreneurial skills, independence and welfare, create harmony with the community and anticipate the negative stigma of boarding schools that are exclusive, closed and radical.

Keywords: *elective subjects, communication counseling, economic empowerment, boarding schools*

ABSTRAK

Pesantren dapat berperan sebagai lembaga pendidikan agama dan juga menjadi lembaga pendidikan sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan pesantren, santri, alumni dan masyarakat sekitarnya. Penelitian bertujuan untuk merancang model komunikasi pembangunan melalui program pemberdayaan ekonomi santri dalam pendidikan pesantren. Menggunakan *Participatory Learning and Action* (PLA), pemilihan informan dengan purposif, yang terdiri dari pengurus pesantren, ustadz, santri dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data melalui analisis dokumentasi, pengamatan langsung, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Participatory Decision Making* (PDM). Lokasi penelitian di Pesantren Al-Muttaqin, Beber Cirebon Jawa Barat. Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pesantren dapat merancang model komunikasi penyuluhan dan pemberdayaan ekonomi santri melalui materi kewirausahaan dan Koperasi dalam kurikulum pendidikan sebagai pelajaran pilihan atau tambahan bagi santri beserta program praktikum dan magang. Santri akan memiliki keahlian kewirausahaan, kemandirian dan kesejahteraan, menciptakan harmonisasi dengan masyarakat serta mengantisipasi stigma negatif pesantren yang eksklusif, tertutup dan radikal.

Kata kunci: mata pelajaran pilihan, komunikasi penyuluhan, pemberdayaan ekonomi, pesantren

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga sosial dan pendidikan yang sudah lama hadir dan berperan di dalam masyarakat menjadi bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dipisahkan antara urusan dunia dan urusan akherat yang berhubungan dengan keimanan mulai dari kelahiran, aktivitas kehidupan sampai kepada kematian. Pesantren menjadi lembaga sosial dan pendidikan yang menyatu dan berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan yang menjadi warisan berharga sebagai kearifan lokal. Menurut Wahjoetomo (1997) dan Yasmadi (2005) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang asli (*indigenous*) yang sudah lama lahir dan berkembang seiring dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat.

Pesantren yang cikal bakalnya sebagai pendidikan informal dan nonformal, sehingga selalu dikatakan sebagai lembaga pendidikan tradisional, namun perannya tetap sebagai agen pembaharu yang mencerdaskan kehidupan khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, berada di daerah pelosok atau terpencil, dan alternatif tempat untuk membentuk serta memperbaiki karakteristik mental dan moral yang kurang baik menjadi lebih baik atau akhlaqlakimah. Perkembangan selanjutnya pesantren menjadi lembaga pendidikan formal yang terdaftar dengan standarisasi pemerintah baik sistem dan proses pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas dan kelulusan. Lebih lanjut terdapat pesantren yang menggabungkan pendidikan formal dengan pendidikan pondok pesantren yang informal dengan sistem menginap atau mondok para siswanya (*santri*) yang di sebut pesantren modern.

Pesantren pada mulanya merupakan lembaga pendidikan informal yang bersifat sosial kemasyarakatan, namun perkembangan selanjutnya banyak pesantren yang menjadi lembaga pendidikan formal atau sering disebut pesantren modern dan terdapat juga yang menggabungkan sistem pendidikan formal dan informal (Fawait 2013; Muhakamurrohman 2014)

Terdapat berbagai permasalahan yang di hadapai khususnya bagi lembaga pendidikan pesantren khususnya yang masih dinilai tradisional yaitu stigma negatif salah satunya dianggap menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan pemahaman radikal serta sarang teroris yang justru menyebabkan adanya pendangkalan agama seperti intoleransi, fanatisme berlebihan dan permusuhan. Menurut Azra (1996) radikalisme sebagai bentuk pemahaman terhadap Islam yang hanya menjalankan keimanan dan kepercayaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan bentuk sikap perilaku yang cenderung keras atau radikal sebagai bentuk kepentingan ke luar (lingkungan dan orang lain).

Radikalisme tumbuh atas pemahaman dan fanatisme agama yang tidak diimbangi oleh sifat humanistik, persaudaraan, empati, toleransi, saling menolong, kesadaran hidup bersama untuk memasalahkan dan menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Radikalisme menumbuhkan sifat kebencian, permusuhan dan peperangan terhadap pihak lain yang dianggap tidak sefaham atau satu idiologi, kepercayaan dan keyakinan. Radikalisme juga sebagai bentuk rasa dendam, frustrasi, kecemburuan, dan kesenjangan baik sosial, politik dan ekonomi, sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan konflik permusuhan dan memilih jihad kekerasan, pembunuhan dan pengeboman sebagai jalan pintas untuk alasan kebahagiaan akherat.

Seharusnya konsep jihad tidak hanya difahami sebagai konteks peperangan melawan musuh dengan dalih sebagai jalan terbaik untuk mati di jalan Allah sebagai cita-cita mulia dan tertinggi, sehingga konsep jihad berpotensi untuk dipengaruhi doktrin kekerasan yang dijadikan dasar bagi para pelaku terorisme di Indonesia. Padahal konsep jihad sebagai bentuk melawan pada nafsu dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta melawan musuh dengan jihad fi sabilillah (Wibowo 2012; Ngadhimah dan Huda 2015). Radikalisme melakukan praktek menolak terhadap proses dialog, pendekatan persiatif dan menempuh jalan moderat, padahal dalam Islam konsep jihad merupakan bentuk ikhtiar secara sungguh-sungguh sekuat tenaga, mental dan pemikiran untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, karena jika ada unsur kekerasan bertentangan dengan konsep rahmatan lil'alaim (Sanusi, 2010; Abdullah 2016).

Maka pesantren perlu lebih berperan dan terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat luas melalui komunikasi pembangunan melalui pemberdayaan santri dan masyarakat secara partisipatif di berbagai kebutuhan kehidupan, tidak lagi dinilai tertutup atau eksklusif, dan radikal, dapat mencegah kesenjangan ekonomi dan konflik sosial serta ekonomi. Menurut Sumarto (2004) pembangunan sebagai proses interaksi (komunikasi) dan aksi (tindakan) yang terencana untuk lebih mensejahterakan kehidupan, tidak lepas dari peran aktor pembangunan itu sendiri. Aktor pembangunan yang dimaksud adalah pemilik dan pengurus pesantren, ustadz dan santrinya yang akan melaksanakan pemberdayaan ekonomi di pesantren untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan semua. Sumardjo (2007) menyatakan pembangunan merupakan perubahan sosial yang bersifat mendasar dan direncanakan oleh pihak yang menghendaki pembangunan itu yaitu rakyat dan pemerintah. Komunikasi pembangunan merupakan prasyarat untuk terwujudnya proses pembangunan yang dikehendaki semua pihak. Jumiati *et al.* (2016) menegaskan bahwa kegagalan dalam implementasi pemberdayaan masyarakat disebabkan kurangnya komunikasi yang bersifat partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode *Participatory Learning and Action* (PLA), sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masyarakat serta mendapat pemahaman yang mendalam tentang situasi suatu komunitas (Adi 2013), pemilihan informan secara purposif yaitu pemilik dan para pengurus pesantren, ustadz (guru) dan santri sebagai pengurus kelompok usaha. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara terbuka (*opened interview*), dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memahami sikap dan perilaku komunitas secara terfokus serta dialogis, kemudian melaksanakan *Participatory Decision Making* (PDM). Lokasi penelitian ditentukan di pondok pesantren Al-Muttaqin Kecamatan Beber Cirebon Jawa Barat. Analisis penelitian menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman (2007) dengan tahapan reduksi data untuk proses pemilihan, penyederhanaan dan klasifikasi yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. Penyajian data untuk pengambilan tindakan dan verifikasi untuk membuat penjelasan, pola, dan konfigurasi yang utuh, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren Al Muttaqin terletak di jalan raya antara Cirebon dan Kuningan, tepatnya di daerah Kondangsari Beber Cirebon Jawa Barat, sebagai lembaga pendidikan modern tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Proses pendidikan dengan sistem pondok pesantren yang memiliki pola asuh 24 jam yang bertujuan santri dapat menerima dan menerapkan ilmu lebih baik. Berdiri sejak tahun 2004 yang mengambil peran mempersiapkan generasi “Alim Muttaqi” dengan pola “Tarbiyah Islamiyah” yang memadukan kurikulum departemen pendidikan nasional dan pondok pesantren dengan harapan sesuai visi untuk menciptakan generasi berprestasi, bertaqwa, mandiri, kreatif serta berperan aktif menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Jumlah santri sebanyak 104 dan luas wilayah sekitar 2,1 hektar yang potensial untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi baik peternakan maupun perkebunan untuk santri dan pesantren.

Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Mengantisipasi stigma negatif pesantren yang dinilai mengajarkan radikalisme dapat dilakukan diantaranya dengan menjadikan pesantren bukan saja sebagai lembaga sosial dan pendidikan agama, tetapi menjadi lembaga pendidikan ekonomi yang dapat mengembangkan potensi dan sumber daya baik lingkungan, ekonomi dan masyarakat, sehingga pesantren bukan hanya melakukan aktivitas pendidikan dakwah agama, melainkan melakukan pendidikan dan aktivitas amaliyah yang dapat memasalahkan santri, pesantren dan masyarakat sekitar. Pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang juga mengajarkan dan mempraktekkan tentang konsep pemberdayaan ekonomi, pembentukan dan pengembangan kelembagaan usaha seperti mini market, perbengkelan, koperasi syariah, lembaga keuangan syariah, pertanian, peternakan dan perikanan. Sehingga pesantren selain membentuk dan meluluskan ustadz untuk melanjutkan pendidikan agama, juga menciptakan wirausaha, kelompok usaha dan lembaga ekonomi yang bermanfaat baik bagi santri, lulusan, pesantren dan masyarakat sekitar. Pesantren akan memiliki ciri khas sebagai lembaga pondok pesantren abribisnis, pesantren pertanian dan peternakan, pesantren ekonomi syariah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran ekonomi syariah, manajemen usaha, kewirausahaan, koperasi dan pemberdayaan ekonomi dalam kurikulum pesantren baik sebagai pengantar atau mata pelajaran umum, maupun pelajaran khusus, penuruan atau peminatan, dan muatan lokal. Menurut Sahri (2016) salah satu penyebab dari munculnya radikalisme karena kemiskinan atau ketidakberdayaan dalam menghadapi kehidupan dari segi ekonomi, dengan demikian perlu ada pendekatan kesejahteraan daripada keamanan. Maka untuk mewujudkan kesejahteraan membutuhkan program pemberdayaan, menurut Adams (2003) dan Suhartini *et al.* (2005) pemberdayaan merupakan media yang membantu individu, komunitas, dan masyarakat supaya mampu memenej lingkungannya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga mampu bekerja dan membantu dirinya dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup. Menurut Susmono dan Hidayat (2010) pemberdayaan masyarakat merupakan proses memberikan kesempatan dan memberikan kekuatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Pemberdayaan merupakan bagian dari praktek komunikasi pembangunan, sebagaimana menurut Mefalopulos (2008) dan Nurjanah *et al.* (2017) komunikasi dalam pembangunan dengan memfasilitasi media dialog untuk

mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan, kemudian merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa sebagai komunitas akar rumput.

Dalam proses dialog dan diskusi peneliti tetap memberikan perspektif lain bahwa muatan pendidikan di pesantren tetap saja memerlukan dan penting untuk mengajarkan tentang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan santri, pesantren dan masyarakat sekitar. Karena pesantren bukannya mencetak ustadz, ustadzah dan kiyai yang kompeten di bidang keagamaan tetapi juga ada yang kompeten di bidang ekonomi Islam baik sebagai enterpreneur atau pengusaha, konsultan dan ahli ekonomi Islam. Bahkan bisa menjadi agen pembaharu ekonomi Islam yang bisa memasalahkan ummat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ummat Islam tidak boleh hanya berperan dalam bidang keagamaan sebagai ajaran, keyakinan, dan ibadah mahdhoh, tetapi Islam juga berperan dalam urusan memasalahkan secara ekonomi untuk mensejahterakan ummat dan masyarakat. Karena realitas menunjukkan bahwa ummat Islam masih lemah dari segi kehidupan ekonomi artinya belum sebagai pemeran utama dalam bidang ekonomi seperti kurangnya peran ummat Islam dalam bisnis, perdagangan dan usaha kelompok kecil. Ketergantungan ummat Islam dalam ekonomi mulai dari hilir yaitu semangat dan kesadaran berusaha, kepemilikan modal usaha, proses produksi, pemasaran dan jaringan usaha sesama Ummat Islam. Islam dalam bidang ekonomi masih terkesan eksklusif yang berorientasi hanya untuk komunitasnya sendiri, belum menjalin jaringan usaha baik kepada sesama ummat Islam maupun kepada masyarakat secara luas. Walaupun sekarang banyak sekali perbankan dan jasa asuransi yang mulai melakukan adopsi inovasi dengan menggunakan label syariah, tetapi itu sebagai strategi untuk meraih nasabah, klien, kreditor dan debitor dari ummat Islam di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Padahal sejarah Islam baik ketika ajaman Rosul dan jaman sahabat nabi serta sejarah masuknya Islam ke Indonesia bahwa melakukan usaha perniagaan atau perdagangan juga merupakan media dakwah, ibadah dan muammalah.

Program Pemberdayaan sebagai Materi Pembelajaran Pilihan di Pesantren

Pondok pesantren Al Muttaqin Cirebon, pernah memiliki unit usaha dengan membuka warung kelontongan dan sewa kios di pinggir pesantren, namun tidak dilanjutkan, dikarenakan kesulitan mencari pengelola yang bisa total mengurusinya. Pondok pesantren Al Muttaqin hanya memiliki unit usaha kantin dan warung klontongan yang diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan internal santri saja, sehingga belum dikembangkan menjadi usaha ekonomi yang lebih besar. Kendala yang selama ini dihadapi yaitu sumber daya manusia yang akan mengelola usaha baik warung klontogan dan Koperasi masih dilakukan oleh ustadz yang memiliki keterbatasan waktu karena tugas dan kewajibannya untuk mengajar. Sehingga kurang secara maksimal terkelola dengan baik, waktu yang diberikan hanya sisa luang setelah mengajar. Kemudian pihak pimpinan pondok pesantren sebetulnya memiliki keinginan dan semangat untuk memasukkan materi ekonomi Islam dalam mata pelajaran termasuk pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi di pesantren, tetapi terkendalam staf pengajar yang belum tersedia sehingga harus mendatangkan yang ahli atau menguasai bidang tersebut.

Pondok pesantren Al Muttaqin memiliki potensi dengan luas lahan 2,1 hektar berada di lokasi strategis yaitu di pinggir jalan raya jalur Cirebon dan Kuningan. Lahan tersebut dapat dijadikan media pemberdayaan ekonomi bagi santri, Asatirin ustadz dan keluarganya serta alumni. Potensi untuk membuat

tanaman sayuran hortikultura dan hidroponik dapat dilakukan karena cocok di dataran tinggi minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantren. Kendala tentang sumber daya manusia untuk memebentuk dan mengembangkan usaha ekonomi baik koperasi, warung klontongan, dan budi daya hortikultura dapat dilakukan dengan membentuk pengurus khusus yang mengelola jenis usaha, terutama istri-istri ustadz yang kebetulan bukan staf pengajar atau hanya berprofesi ibu rumah tangga, kemudian dari pihak alumni yang belum bekerja.

Rekomendasi untuk memasukkan mata pelajaran ekonomi Islam tentang kewirausahaan, menejemen ekonomi Islam (syariah), dan koperasi syariah tetap diberikan sekalipun santri masih tingkat pendidikan Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena sangat penting untuk pengenalan dan pembentukan semangat, kesadaran dan keterampilan dasar bagi generasi ummat Islam sebagai landasan yang akan membekali santri. Sehingga pesantren akan memiliki rencana untuk mencari dan mendatangkan staf pengajar khusus tentang ekonomi Islam seperti kewirausahaan, menejemen ekonomi syariah dan Koperasi syariah sebagai mata pelajaran tambahan dan muatan lokal. Menurut Pambudy (2009) pelaksanaan proses pembangunan, fungsi komunikasi menjadi penting bagi semua *stakeholder* untuk menggerakkan masyarakat, menyadarkan masyarakat, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Peran komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan terutama yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat. Mardikanto dan Soebiato (2012) komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesatuan sebagai suatu usaha untuk memfasilitasi masyarakat lokal dengan membuka partisipasi dan media komunikasi untuk berdialog merencanakan, mutuskan dan mengelola sumber daya melalui *collective action* dan *network* sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial, salah satunya dengan berorientasi untuk memperbaiki dan meningkatkan bidang pendidikan.

Pemberdayaan ekonomi Islam melalui komunikasi pembangunan melalui pembuatan program kegiatan pemberdayaan mulai dari penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan kemitraan, termasuk memasukkan materi pelajaran seperti kewirausahaan Islam, menejemen usaha syariah dan Koperasi syariah akan mejadi media interaksi dan publikasi untuk menangkal tuduhan stigma negatif pesantren yang eksklusif yang tertutup, radikal dan menjadi sarang teroris. Karena pesantren kecenderungan sebagai lembaga sosial dan pendidikan yang terfokus pada pelajaran dan dakwah agama, tetapi kurang memiliki keinginan untuk menambah fokus kegiatan dan pemberlajaran pada ekonomi Islam atau mejemen usaha syariah. Media komunikasi pesantren masih terbatas yaitu hanya mengelola bidang pendidikan agama, tetapi masih kurang media interaksi amaliyah secara ekonomi. Hartono (2012) dan Rahmawati (2016) pesantren dapat menyesuaikan dan berkembang dinamis karena memiki budaya yang menuntut kedisipilan dan kemandirian santri serta pola interaksi sosial yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Kemudian pemberdayaan ekonomi dalam pendidikan pesantren dapat menciptakan insan yang betaqwa yang dapat bermanfaat untuk kemaslahatan pembangunan. Menurut Burhanudin (2008) pembangunan memiliki dampak pada perubahan perilaku manusia, akan menghasilkan manusia yang berjiwa selalu ingin membangun, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan.

Membangun tradisi komunikasi pembangunan yang terbuka, egaliter dan partisipatif untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi dan memasukkan mata pelajaran ekonomi Islam di pesantren serta dengan aktivitas usaha ekonomi bisa menjadi media dakwah amaliyah selain dapat menciptakan keajaiban bagi santri dan alumni juga bagi masyarakat sekitar. Sulistyowati *et al.* (2005) menyatakan komunikasi diperlukan untuk melakukan pendekatan yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan memecahkan masalahnya sendiri yang semakin kompleks, dan mengkondisikan masyarakat bebas berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya. Menurut Mulyana (2007) mempertegas tentang komunikasi pembangunan yang harus dikembangkan adalah komunikasi pembangunan yang berorientasi kerakyatan. Pendekatannya lebih bersifat fenomenologis dan bahkan kritis yang menuntut dialog antara pihak-pihak yang punya gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan. Begitupun Novek (2007) menyatakan pentingnya komunikasi dalam proses membangun dan mengembangkan suatu komunitas dan bertindak bersama untuk menciptakan perubahan sosial.

Pesantren dan santri dengan pemberdayaan ekonomi dan aktivitas ekonominya akan memperkuat citra positif dan ikatan kuat dengan masyarakat atau publik sehingga tuduhan atau stigma negatif yang sekarang ini diidentikkan dengan pesantren akan terjawab. Selama ini pesantren terkesan eksklusif dan tertutup serta tidak berbaur dengan masyarakat sekitar, karena kurang memiliki media interaksi dengan masyarakat luas selain dengan keluarga santri, media yang paling efektif diantaranya yaitu media pemberdayaan ekonomi dan kegiatan usaha ekonomi yang fasenya bisa membentuk dan mengembangkan di pesantren terlebih dahulu, kemudian fase berikutnya melibatkan pihak alumni dan masyarakat sekitar.

Pemberdayaan ekonomi pesantren dan muatan mata pelajaran serta minat kegiatan ekstrakurikuler dapat dirancang dengan menyebarkan angket kepada santri dan para ustadz. Kemudian hasil angket diidentifikasi dan dianalisis untuk dijadikan bahan kajian atau dialog dan pertimbangan pembuatan program. Tahap berikutnya menyelenggarakan forum dialog atau sambung rasa untuk membahas hasil angket sehingga program pemberdayaan ekonomi, minat dan mata pelajaran ekonomi yang akan dirancang sesuai dengan aspirasi, potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dari santri dan pesantren. Hamdani (2012) menyatakan proses konseling santri supaya mengetahui motif, minat dan karakteristik atau potensi baik sosial maupun ekonomi untuk merancang masa depan santri baik pendidikan dan karier. Muharom (2015) peran tim hubungan masyarakat dalam pesantren dapat menjadi mediator dan fasilitator dengan pihak luar baik calon santri maupun orang tua santri dan masyarakat sekitar untuk memperbaiki nama baik atau pencitraan pesantren yang terkadang memiliki stigma negatif.

Proses dialog sambung rasa kemudian di kaji serta dapat melibatkan ustadz dan pihak alumni untuk membuat dan melaksanakan program pemberdayaan dan kurikulum ekonomi Islam merealisasikan. Sebagaimana menurut Muklasin (2016) dan Sulaiman *et al.* (2018) pembuatan, penentuan dan realisasi program pendidikan serta kegiatan di pesantren dilaksanakan secara partisipatif dan dialogis dalam musyawarah untuk mengakomodasi semua usulan dan kebutuhan semua pihak. Hidayat (2016) untuk menciptakan dinamisasi, proses pembelajaran yang efektif dan perkembangan pesantren, maka dibutuhkan media komunikasi yang terbuka

antara kiyai dan santri. Servaes (1999) menyatakan pemberdayaan memiliki hubungan dengan partisipasi untuk membuat keputusan kolektif pada semua lapisan masyarakat untuk membantu diri mereka sendiri dan menentukan tujuannya sendiri.

Pesantren dapat juga melibatkan pihak perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi termasuk kerjasama dengan pesantren lainnya yang sudah berkembang serta maju kegiatan ekonominya. Kendala yang masih dihadapi adalah masih kurangnya kemauan dari pihak pesantren untuk dapat bermitra dengan perguruan tinggi dan pesantren lainnya, yang sebetulnya dapat diajukan kerjasama. Pihak pemerintah daerah dan pusat dapat juga secara proaktif berinisiasi untuk memiliki dan menjalankan program pemberdayaan ekonomi pesantren, bukan hanya memonitoring dan mengevaluasi aktivitas kegiatan pesantren dari segi pendidikan agama saja, apalagi dengan pertimbangan mencurigai atas stigma negatif yang terbentuk. Pesantren seharusnya didekati dan dijadikan mitra bagi pembangunan oleh pemerintah, yang memiliki program dan anggaran serta tanggung jawab untuk melibatkan semua pihak dalam proses pembangunan serta mensejahterakan masyarakat. Menurut Hedley Tah (2014) orientasi komunikasi bergerak dari kepekaan secara vertikal dari atas ke bawah menuju pada partisipasi dan pemberdayaan (secara horizontal) sebagai proses pengetahuan yang diperoleh individu dalam memenuhi kebutuhan akan hak dan kewajibannya.

Termasuk perguruan tinggi untuk peduli dan empati pada pemberdayaan ekonomi pesantren khususnya yang mendapat stigma negatif dengan program pengabdian masyarakat, riset, praktikum dan magang, serta program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Menurut Arfiansyah dan Riza (2016) pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional membutuhkan lebih besar perhatian khususnya dari pihak lain seperti pemerintah dibandingkan dengan lembaga pendidikan terpadu atau modern, khususnya dalam manajemen pengembangan kelembagaan pendidikan. Handoko *et al.* (2014) menyatakan pemerintah dapat secara proaktif memfasilitasi untuk membuka komunikasi partisipatif dalam proses pembangunan khususnya di pedesaan sebagai kunci keberhasilan dalam pemberdayaan serta kesejahteraan ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pesantren dapat melakukan komunikasi pembangunan untuk merancang program pemberdayaan ekonomi berdasarkan potensi, minat dan sumber daya secara partisipatif dengan melibatkan para santri, orang tua santri, alumni, ustadz dan pengelola pesantren.

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pesantren dapat berkerjasama dengan pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga sosial dan pesantren lainnya yang telah berhasil dalam pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan dan Koperasi.

Komunikasi pembangunan di pesantren melalui program pemberdayaan ekonomi dapat dilaksanakan dalam dua tahap komunikasi, yaitu (1) Tahap pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ekstrakurikuler yang wajib bagi para santri yang akan lulus atau alumni yang baru lulus yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan dengan bekerjasama dengan pihak di luar pesantren. (2) Tahap pemberdayaan ekonomi dalam kegiatan mata pelajaran pilihan atau peminatan dalam kurikulum pendidikan pesantren, dengan

materi teori dan praktikum atau magang di tempatkan dilokasi pemberdayaan atau kewirausahaan baik di pesantren sendiri ataupun di luar pesantren dengan bekerjasama dengan pihak lain.

Pemberdayaan ekonomi pesantren dapat menjadi peluang kerja bagi santri dan lulusan pesantren, serta sumber penghasilan tambahan bagi pesantren sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian ekonomi. Kemudian dapat juga sebagai media interaksi dengan masyarakat dan kelembagaan lain supaya menjawab stigma negatif pesantren yang dinilai eksklusif, tertutup, fanatik dan terjadi pendangkalan agama, dan radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 2016. Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. *Jurnal Addin. Vol 10(1): 1-28.*
- Adams, R. 2003. *Social Work and Empowerment. 3rd ed.* New York: Palgrave Macmillan.
- Adi, IR. 2013. Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat : Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arfiansyah, & Riza M. 2016. Dampak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 451.2/474/2003 terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah. *Vol 15(2): 177-212.*
- Azra, A. 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalis, Modernis, Hingga Post Modernisme.* Jakarta: Paramadina.
- Burhanudin, AY. 2008. Perencanaan Program Pemberdayaan Menuju Perubahan dalam Masyarakat. *Jurnal Paradigma. Vol 5(1):47-62.*
- Fawait, A. 2013. Transformasi Pengembangan Tradisi Pondok Pesantren. *Jurnal Edu-Islamika, Vol 5(1): 93-122.*
- Hamdani. 2012. *Bimbingan dan Penyuluhan.* Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko, W, Sulaiman, AI, & Akbar, AAS. 2014. Komunikasi Partisipatif dalam Proses Pembangunan Bendungan Matenggeng Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol 17(2):141-152.*
- Hartono, D. 2012. *Pengembangan Manajemen Pondok Pesantren di Era Globalisasi.* Surabaya: Ponpes Jagad Alimussiry.
- Hedley Tah, T. 2014. Participation for Political Development in Cameroon. *International Journal of Humanities and Social Science. Vol 4 (7): 150-153.*
- Hidayat. M. 2016. Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM. Vol 2(6): 385-395.*
- Jumiati, IE, Muhtar, EA, & Irawati, IR. 2016. Communication And Community Empowerment In National Program For Community Empowerment (Pnpm) Mandiri In Serang City. *Journal Of Humanities And Social Science. Vol 21(7): 140-147.*
- Mardikanto, T, & Soebiato, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

- Mefalopulos, Paolo. 2008. *Development Communication Sourcebook Broadening the Boundaries of Communication*. Washington DC: The World Bank.
- Miles MB, Huberman AM. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Rohidi TR, penerjemah. Jakarta: UI Press.
- Muhakamurrohman, A. 2014. Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. *Ibda :Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol 12(2):108-119.
- Muharom, F. 2015. Respons Pondok Pesanten terhadap Problem Pencitraan di Media: Studi Pemulihan Citra Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta. *Disertasi*. UIN Sunankali Jaga Yogyakarta.
- Muklasin. 2016. Manajemen Pendidikan Karakter Santri: Studi Kualitatif di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. *Tesis*. Universitas Lampung.
- Mulyana, D. 2007. Membangun Komunikasi Pembangunan yang Humanistik [Kata Pengantar]. Di dalam Dilla S, penulis. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ngadhimah, & Huda, R. 2015. Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Kaitannya dengan Materi Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Cendekia*, Vol 13(1): 1-20.
- Novek, EM. 2007. Communication and community empowerment. *Peace Review (A Journal of Social Justice)*. Vol 11(1): 61-68.
- Nurjanah, A, Karsidi, R, Muktiyo, W, Habsari, SK, 2017. Dialogic Communication Patterns between Company-Community in Achieving Community Empowerment In Indonesia : A Case Study of Waste Problem. *Global Media Journal*. Vol 15(28):1-8.
- Pambudy R. 2009. Pola Komunikasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. *Prosiding Seminar Nasional*. Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat. Kamis, 19 November 2009. IPB *International Convention Center (IPB ICC) Bogor (ID)*: 67-77.
- Rahmawati, RF. 2016. Konseling Budaya Pesantren : studi deskriptif terhadap Pelayanan Bimbingan Konseling Bagi santri Baru. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol 7(1): 61-84.
- Sahri. 2016. Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi : Perpektif Politik Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*. Vol 6(1): 237-268.
- Sanusi, DM. 2010. *Antara Jihad dan Terorisme*. Makasar: Pustaka As-Sunnah.
- Servaes, J. 1999. *Communication for Development: One World, Multiple Cultures*. Cresskill NJ: Hampton Press.
- Sulaiman, AI, Chusmeru, & Masrukin. 2018. Strategy of Cooperative Islamic Boarding School as Economic Empowerment Community. Inferensi: *Jurnal Sosial Keagamaan*. Vol 12(1): 25-44.
- Sulistyowati, F, Setyowati, Y, & Wuryantoro, T. 2005. *Komunikasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: APMD Pr.

- Suhartini, A, Imam, H, Khambali, & Basyid A. 2005. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sumardjo. 2007. Komunikasi dalam Perspektif Ekologi Manusia. Di dalam : Adiwibowo S, editor. *Ekologi Manusia*. Bogor : FEM IPB.
- Sumarto HS. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Susmono, J, & Hidayat, B. 2010. Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi. Jakarta: Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) Bappenas.
- Wahjoetomo, 1997. *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wibowo, SB. 2012. *Inilah Jihad* Yogyakarta: Gava Media.
- Yasmadi, 2005. *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Quantum Teaching.